

IKPA Naik, tapi Nilai Belanja Kontraktual Turun: Ada yang “Melambat” di Balik Angka

Kabar baiknya, nilai IKPA KPPN Takengon **naik** dari **95,10 (2024)** menjadi **97,31 (2025)** sebuah sinyal bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran di wilayah kerja semakin tertib. Namun, kabar baik itu disertai catatan kecil yang layak jadi bahan renungan bersama: indikator **Belanja Kontraktual** justru **turun** dari **96,18 (2024)** menjadi **94,73 (2025)**. Turun tipis? Iya. Tapi dalam pengelolaan APBN, “turun tipis” pada belanja kontraktual sering kali berarti: ada proses yang **melambat** dan jika dibiarkan, pelambatan kecil bisa berubah menjadi penumpukan besar di semester II.

Belanja Kontraktual itu apa sih? Kenapa penting?

Sederhananya, indikator Belanja Kontraktual mengukur **seberapa cepat dan tertib satker mengeksekusi belanja berbasis kontrak** mulai dari kontrak yang ditandatangani lebih awal, didaftarkan ke KPPN, hingga belanja modal yang dibayar lebih cepat. Indikator ini dihitung dari nilai komposit beberapa komponen: **kontrak dini/kontrak sampai triwulan I yang didaftarkan, akselerasi belanja modal tertentu, dan rasio kontrak yang ditandatangani sampai triwulan II serta didaftarkan**. Dengan kata lain, indikator ini memotret apakah “mesin pengadaan dan pembayaran” sudah menyala sejak awal tahun atau baru dipaksa berlari mendekati akhir tahun. ,

Kalau dianalogikan, Belanja Kontraktual itu seperti indikator “start awal” dalam lari maraton. Bisa saja finis tetap tercapai, tapi kalau start terlambat, risikonya meningkat: ngos-ngosan, salah langkah, dan kualitas output menurun.

Kenapa 2025 lebih rentan?

Tahun 2025 bukan tahun biasa. Kebijakan efisiensi belanja berdampak pada banyak satker: ada blokir, penundaan kegiatan, sampai kecenderungan menunggu revisi anggaran sebelum mulai pengadaan. Karena dinamika itu, DJPb juga menerapkan penyesuaian data/perhitungan IKPA 2025 untuk beberapa indikator (termasuk Belanja Kontraktual) agar penilaian tetap wajar dan menjaga prinsip kewajaran (*fairness treatment*). Namun, penyesuaian formula tidak otomatis membuat proses kontrak menjadi cepat. Kalau tender tertunda dan kontrak mundur, “tanda-tanda melambat” tetap akan muncul pada indikator yang sensitif terhadap waktu. ,

Titik paling sering “bocor”: pendaftaran kontrak

Satu hal yang sering terlihat sepele, tapi dampaknya besar, adalah **pendaftaran kontrak**. Aturan tegas menyebut pendaftaran kontrak ke KPPN dilakukan paling lama **5 (lima) hari kerja** setelah kontrak ditandatangani, dan ketentuan serupa berlaku untuk perubahan/addendum kontrak. ,

Dalam praktik, banyak satker sudah menandatangani kontrak tepat waktu, tapi pencatatannya terlambat karena:

- koordinasi internal (PPK–operator) belum rapat,
- dokumen perubahan belum segera didaftarkan,
- atau proses administratif menumpuk.

Akibatnya, kontrak yang sebenarnya sudah ada bisa “terlihat terlambat” di sistem, lalu nilai indikator ikut terkoreksi. ,

Pendaftaran kontrak dan addendum adalah kewajiban sesuai ketentuan. Dalam konteks IKPA, kontrak yang menjadi basis penilaian Belanja Kontraktual adalah kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN; karena itu, keterlambatan pendaftaran dapat memengaruhi ketercakupannya data kontrak dalam periode penilaian

Apa pelajaran dari penurunan Belanja Kontraktual di Takengon?

Dari data KPPN Takengon, pelajaran utamanya adalah: **kenaikan IKPA agregat tidak otomatis berarti semua indikator naik bersama**. Artinya, pembinaan pada aspek perencanaan bisa sangat berhasil, sementara aspek yang berbasis proses kontrak masih memerlukan pengawalan yang lebih detail.

Belanja Kontraktual itu indikator “rantai pasok” kalau satu mata rantai terlambat, efeknya menjalar:

1. pengadaan mundur → 2) kontrak mundur → 3) pendaftaran mundur → 4) distribusi kontrak tak merata sampai triwulan II → 5) pembayaran belanja modal melambat. ,

Dan ketika semua ini bertemu semester II, kita tahu risikonya: belanja menumpuk, beban kerja melonjak, ruang koreksi mengecil, dan kualitas belanja rentan terkompromi.

Tiga pesan praktis (bukan teori) untuk 2026

Agar penurunan nilai IKPA tidak berulang, ada tiga langkah sederhana namun berdampak:

1) Kunci kontrak dini sebagai kebiasaan, bukan target musiman

Kontrak dini bukan sekadar mengejar nilai; ia memindahkan risiko dari semester II ke semester I. Dalam indikator IKPA, kontrak yang ditandatangani lebih awal dan didaftarkan memberi kontribusi lebih baik pada komponen penilaian. ,

2) Disiplin “5 hari kerja” untuk pendaftaran kontrak dan addendum

Ini disiplin yang paling konkret: begitu kontrak ditandatangani, pastikan OTP Kontrak masuk ke KPPN maksimal 5 hari kerja. Begitu ada perubahan, OTP Addendum juga maksimal 5 hari kerja. ,

3) Dorong distribusi kontrak merata sampai triwulan II

Banyak satker merasa aman setelah kontrak ditandatangani. Padahal, indikator juga melihat distribusi hingga triwulan II. Maka, pengawalan tidak berhenti di kontrak, tetapi sampai pada aliran kontrak yang lebih merata dan pembayaran yang tidak tertahan. ,

Penutup: Belanja Kontraktual adalah “cermin kebiasaan”

Nilai IKPA yang tinggi adalah prestasi. Tapi indikator Belanja Kontraktual mengingatkan kita bahwa prestasi akan lebih kokoh bila ditopang oleh kebiasaan: mulai cepat, tertib mencatat, disiplin tenggat, dan konsisten mengawal sampai pembayaran. Pada akhirnya, tujuan utamanya bukan skormelainkan memastikan belanja negara bergerak tepat waktu, akuntabel, dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.